



17+8 TUNTUTAN RAKYAT: KRISIS KEPERCAYAAN DAN REFORMASI DPR PADA ERA PRESIDEN PRABOWO

(17+8 PEOPLE'S DEMANDS: CRISIS OF TRUST AND REFORM IN THE DPR DURING PRESIDENT PRABOWO'S ERA)

Keiza Azzahra Salsabila¹, Nazwa Anastasya², Zahtza Saritza³, Aurelia Christina Simanjuntak⁴, Mufidin Nafis⁵, Kartini R Situmorang⁶, Ria Manurung⁷, Silvia Annisa⁸

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Email: keizaazzahra@student.usu.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 24-09-2025

Revised : 25-09-2025

Accepted : 27-09-2025

Published : 30-09-2025

Abstract

The government's policy regarding the House of Representatives (DPR) to increase salaries and allowances has triggered a social movement based on social inequality between officials and the public. This phenomenon involves Indonesians experiencing widespread poverty, while regional officials dance to express joy at the suffering of their own people. This has led to public anger and demands for action against this inappropriate policy, as well as the arbitrary responses of officials, further escalating the situation. Therefore, in this study, we will examine the current dynamics from a sociological perspective and compare them with similar events during the 1998 demonstrations, demonstrating how to prove to everyone that power over the people rests with the people themselves.

Keywords: *Crisis of Trust, DPR Reform, President Prabowo Era*

Abstrak

Kebijakan pemerintah tentang lembaga DPR untuk di naikan gaji dan tunjangan lembaga DPR itu sendiri, memicu gerakan sosial yang didasari oleh ketimpangan sosial antara pejabat dan masyarakat, dimana adanya fenomena rakyat indonesia yang sedang mengalami kemiskinan dimana mana dan disisi lain para pejabat daerah nya berjoget joget menggambarkan senang di atas penderitaan bangsanya sendiri, hal ini menyebabkan emosi kemarahan masyarakat untuk menuntut kebijakan yang tidak sepatutnya itu serta tanggapan pejabat yang semena mena membuat situasi semakin memanas, oleh karena itu di penelitian ini kami akan membahas dinamika yang telah terjadi saat ini dalam sudut pandang sosiologi dan akan membandingkan nya dengan hal serupa pada Demonstrasi 1998 bagaimana untuk membuktikan semua orang bahwasannya kekuasaan atas rakyat dipegang oleh rakyat itu sendiri.

Kata Kunci: *Krisis Kepercayaan, Reformasi DPR, Era Presiden Prabowo*

PENDAHULUAN

Demonstrasi adalah suatu ujuk rasa atau protes yang di lakukan oleh sekelompok masyarakat yang dimana demonstrasi dilakukan di tempat umum. Demonstrasi di lakukan untuk menyampaikan segala ketidakadilan bagi masyarakat kepada pemerintahan. Demonstrasi yang terjadi di Indonesia sekarang mengenai ketidakadilan yang di rasakan masyarakat. Aksi demonstrasi sering kali di warnai dengan eskalasi konflik.

Aksi yang di lakukan oleh sekelompok mahasiswa dan masyarakat bahwasanya menuntut adanya 17+8 yang tidak sekedar daftar teknis, melainkan simbol dari akumulasi kekecewaan publik terhadap cara negara mengelola demokrasi dan menyerap aspirasi Masyarakat. Dimana salah satu tuntutan tersebut ialah kenaikan pajak yang sangat drastis, masyarakat menyampaikan keresahan



mereka dengan demonstrasi tersebut. Demonstrasi yang di lakukan saat itu berujung ricuh ada sebagian orang yang anarkis, dengan adanya demonstrasi ini terjadi kemacetan serta kerusakan fasilitas umum yang dimana kerusakan tersebut dapat merugikan pengguna jalan lainnya. (Rohman, 2025)

Tuntutan yang di lakukan ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan keadilan, ada pun tuntutan salah satu nya yaitu Tindakan represif aparat keamanan yang menyebabkan adanya korban jiwa saat aksi demonstrasi terjadi. Tuntutan tuntutan ini di lakukan agar masyarakat mendapat kan keadilan yang sesungguhnya.

Fenomena gelombang protes dengan sederet tuntutan rakyat saat ini seakan menghadirkan kembali memori publik terhadap peristiwa tahun 1998. Pada masa itu, mahasiswa bersama berbagai elemen masyarakat turun ke jalan membawa suara perubahan. Krisis multidimensi mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial yang menjadi pemicu utama runtuhnya kepercayaan terhadap pemerintah dan DPR (Himawan et al., 2022). Situasi tersebut menimbulkan gelombang besar yang tidak hanya berhenti pada aksi demonstrasi, tetapi juga membuka pintu reformasi yang mengubah arah perjalanan bangsa.

Apabila ditarik garis perbandingan, terdapat pola kemiripan yang cukup jelas. Rakyat kembali bersuara lantang dengan membawa daftar panjang tuntutan, menunjukkan bahwa ada jarak yang semakin melebar antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. Rasa “*dejavu*” ini memperkuat ingatan kolektif bahwa setiap kali krisis kepercayaan terhadap lembaga negara mencapai titik puncak, protes besar hampir selalu muncul sebagai bentuk koreksi dari bawah (Munsi, 2016). Dengan kata lain, publik seolah diingatkan bahwa suara rakyat masih menjadi kekuatan penting dalam menentukan arah demokrasi di Indonesia.

Namun, pertanyaan terbuka yang muncul adalah apakah tuntutan rakyat hari ini hanya sebatas ekspresi ketidakpuasan sesaat, ataukah menjadi titik balik menuju perubahan yang lebih fundamental, seperti halnya pada 1998? Lebih jauh lagi, bagaimana gelombang tuntutan ini dapat dibaca sebagai indikasi krisis kepercayaan terhadap DPR, dan sejauh mana ia mampu membuka peluang bagi lahirnya reformasi baru di tubuh lembaga legislatif? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dikaji karena akan menentukan apakah gerakan rakyat saat ini mampu menggeser dinamika politik ke arah yang lebih progresif, atau justru terjebak dalam siklus ketidakpercayaan tanpa solusi nyata.

Tujuan

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika 17+8 tuntutan rakyat pada er Presiden Prabowo sebagai refleksi atas kekecewaan public terhadap praktik politik yang dianggap tidak lagi mewakili kepentingan rakyat. Tuntutan ini bukan hanya sekedar daftar aspirasi akan tetappi juga sebagai symbol dari krisis representasi politik yang memperlihatkan jurang antara rakyat dengan pihak elite.

Artikel ini juga mengkaji bagaimana fenomena ini berkaitan dengan krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPR. DPR yan seharusnya berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat justru sering dianggap sebagai actor yang lebih sibuk melayani kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Oleh karena itu muncul dorongan public untuk melakukan reformasi ulang terhadap peran dan fungsi DPR agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.



Selain itu, artikel ini membandingkan gerakan 17+8 dengan gerakan 1998, disaat mahasiswa, masyarakat sipil, dan juga LSM berhasil menekan rezim Soeharto hingga tumbang. Dengan membandingkan kedua momentum ini, menunjukkan persamaan dalam hal krisis legitimasi lembaga Negara, dan juga menyoroti perbedaan konteks sosial-politik dan strategi gerakan.

Kerangka Teori

Teori Hegemoni Antonio Gramsci

Menurut Antonio Gramsci, hegemoni adalah suatu bentuk kekuasaan yang dipertahankan bukan hanya melalui paksaan, melainkan melalui institusi dan persetujuan di tingkat masyarakat sipil. (Gramsci menerangkan bahwa kelas yang berkuasa dapat mempertahankan dominasinya dengan cara memimpin secara moral dan intelektual sehingga pandangan mereka menjadi “common sense” di masyarakat (Martitah et al., 2023).

Konsep - konsep penting di dalam teori Gramsci yaitu Masyarakat Politik (political society) dan Masyarakat Sipil (civil society). Masyarakat politik terdiri lembaga nasional formal seperti DPR, pemerintah, dan aparat hukum yang melaksanakan tugasnya melalui pengaturan dan penegakan hukum. Masyarakat Sipil ialah lingkungan sosial masyarakat umum termasuk pada organisasi, media, yang membentuk opini publik dan menumbuhkan aspirasi (Indonesian Journal of Communication Studies, 2023).

Dalam konteks Indonesia, DPR dapat dilihat sebagai komponen masyarakat politik karena kemampuannya membuat undang-undang serta dalam mengawasi pemerintahan. Ketika DPR mulai memainkan peran yang lebih inklusif dalam politik elit, masyarakat sipil atau masyarakat umum menjadi pemain yang aktif dengan membawa reformasi dan mengkritik pemerintahan. Misalnya, masyarakat menginginkan DPR lebih transparan mengenai isu - isu penting, seperti RUU dan pengawasan (Indonesian Journal of Communication Studies, 2023).

Teori Gerakan Sosial Perspektif Tarrow

Tarrow menempatkan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang akan terjadi apabila rakyat biasa yang bergabung dengan kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, serta pihak-pihak bersangkutan lainnya. (Muhammad, 2016)

Gerakan sosial dalam perspektif Tarrow ini lebih berfokus kepada aspek sosial politik, dimana dalam pernyataan Tarrow, gerakan sosial diartikan sebagai suatu tindakan perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat maupun warga biasa yang bergabung serta membentuk aliansi dengan para tokoh atau kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam suatu Negara, kelompok yang bersama-sama bergerak untuk melakukan perlawanan kepada para pemegang kuasa atau para elit yang terdapat pada politik, ketika apa yang menjadi sebuah kebijakan dinilai tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. (Muhammad, 2016)

Kita bisa menjadikan gerakan mahasiswa pada 1998 sebagai salah satu contoh gerakan sosial. Dimana berbagai organisasi dan kelompok mahasiswa yang berasal dari kampus-kampus yang berbeda, bersatu dengan satu tujuan politik yang sama. Mereka bukanlah satu organisasi tunggal akan tetapi sekumpulan mahasiswa dari banyaknya elemen, misalnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Senat Mahasiswa, dan lainnya. Aliansi mahasiswa tersebut kemudian



bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dimana LSM menjadi mitra dari luar kampus yang memberikan dukungan berbentuk advokasi, riset, ataupun jaringan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur, dengan menggunakan sumber-sumber yang ilmiah serta dokumen resmi, Seperti buku, jurnal, laporan, maupun artikel dari lembaga resmi yang dapat dipercaya, seperti Jurnal Hukum Respublica, Padjadjaran Journal of Law, Journal of Indonesian Legal Studies, Journal of Current Southeast Asian Affairs, Journal of Democracy, Journal of Legislative Studies, serta dari repositori perguruan tinggi dan publikasi lembaga pemerintah seperti BPS (Indeks Demokrasi Indonesia). Selain itu, digunakan pula artikel media daring yang diakui kredibilitasnya seperti Kompas TV, UMJ, dan GoodStats untuk melengkapi data empiris.

Pengkajian difokuskan pada publikasi yang terbit dalam rentang 1965–2025, mencakup total 18 sumber yang terdiri dari jurnal ilmiah seperti nasional, internasional, laporan resmi, buku, serta artikel media terpercaya. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan dengan kriteria relevansi dengan topik, kredibilitas penerbit atau penulis, dan kejelasan dalam metodologi. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini difokuskan untuk mampu menghasilkan analisis yang menyeluruh serta memiliki landasan teoritis yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Kepercayaan

Pada dasarnya persepsi publik terhadap DPR saat ini di posisi yang tercampur, sebagian masyarakat mulai memberikan penilaian yang positif terhadap DPR karena adanya keterbukaan informasi melalui media sosial dan juga siaran langsung saat rapat. Namun di sisi lain masih banyak kritik, kasus korupsi yang mencoreng integritas, berdasarkan data dari GoodStats, tercatat dimulai dari 1 Januari 2004 hingga 31 Desember 2024 Anggota DPR dan DPRD berada di posisi ketiga dengan total 360 Kasus Korupsi. Data ini menekankan minimnya integritas di kalangan pejabat pemerintah yang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. (Yonatan, 2025)

Berdasarkan data dari survey nasional INDIKATOR menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR menunjukkan bahwa hanya 5 persen masyarakat yang sangat percaya, sementara 64 persen masyarakat cukup percaya. Disisi lain ada 26 persen yang kurang percaya, 2 persen yang tidak percaya sama sekali, dan 4 persen yang tidak tahu atau tidak menjawab.

Selain dari faktor korupsi tersebut, kinerja serta kebijakan legislasi juga menjadi salah satu faktor kritikan masyarakat terhadap DPR. DPR dianggap sebagai wakil rakyat yang memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan suara rakyat akan tetapi banyak kebijakan publik yang dikeluarkan tidak pro kepada masyarakat. Dimana adanya kenaikan gaji, tunjangan, serta fasilitas baru untuk anggota DPR dianggap tidak relevan terutama saat masyarakat tengah merasakan tekanan ekonomi. (Rizki, 2025)

Dinamika Gerakan 17+8

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat berawal dari muncul nya ekspresi kekecewaan masyarakat dengan ketidakpuasan publik terhadap kinerja (DPR) dan pemerintah. Dalam 17 tuntutan jangka



pendeknya, masyarakat menyoroti berbagai isu mendesak, seperti penghapusan fasilitas mewah dan tunjangan bagi anggota DPR, pembatasan perjalanan resmi ke luar negeri, penarikan personel militer dari tugas keamanan sipil, pembebasan aktivis yang ditahan tanpa proses hukum yang adil, penyelidikan terhadap dugaan kekerasan oleh aparat keamanan, dan transparansi dalam penggunaan anggaran DPR (Ranawati, 2025)

Adapun delapan tuntutan jangka panjang menuntut perubahan yang lebih mendasar termasuk audit komprehensif terhadap kinerja parlemen dan partai politik, revisi peraturan terkait TNI, POLRI (Popenguatan lembaga hak asasi manusia, percepatan ratifikasi RUU Pengambilalihan Aset Korupsi, dan perbaikan kebijakan ekonomi untuk memastikan keadilan sosial (Beautynesia, 2025). Jadi tuntutan-tuntutan simbolisasi, tekanan publik agar negara dapat memprioritaskan pertanggungjawaban. (Apriliani, 2025)

Dari perspektif akademis, tuntutan-tuntutan ini sejalan dengan teori partisipasi publik. Dalam (Hermanto, 2024) menekankan bahwasannya partisipasi publik merupakan suatu unsur yang krusial dalam mewujudkan legislasi yang inklusif. Jika dibandingkan dengan kajian gerakan sosial, fenomena ini menunjukkan karakteristik serupa. (Haris et al., 2019) dalam Hasanuddin Journal of Sociology menegaskan bahwa gerakan sosial lahir sebagai respon kolektif terhadap perubahan sosial dan seringkali dilakukan secara terorganisir dengan tujuan tertentu.

Namun, dalam praktiknya di Indonesia ini partisipasi publik masih bersifat simbolis dan gagal. Demikian pula, (Mardianti, 2022) menjelaskan bahwa gerakan mahasiswa di Indonesia, dari era Orde Lama hingga Reformasi, memiliki corak sebagai gerakan moral maupun politis, di mana mahasiswa atau publik bergerak atas keresahan rakyat tanpa selalu menargetkan kekuasaan formal. Jadi melihat hasil tanggapan DPR terhadap tuntutan rakyat, memang ada beberapa langkah yang bisa dianggap sebagai perubahan nyata. Misalnya, penghapusan tunjangan rumah, penghentian kunjungan kerja luar negeri yang tidak penting, serta rencana pemangkasan fasilitas komunikasi dan transportasi anggota DPR. Langkah-langkah ini memberi sinyal bahwa desakan publik mampu mendorong DPR untuk bergerak dan menunjukkan repon cepat terhadap isu yang dianggap sensitif oleh masyarakat. Namun, di sisi lain, sebagian besar tuntutan yang lebih mendasar justru belum mendapat jawaban jelas. Permintaan mengenai investigasi independen atas kasus kekerasan aparat, pembebasan demonstran yang ditahan, hingga reformasi hukum dan HAM masih sebatas janji tanpa kepastian waktu maupun mekanisme yang transparan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa DPR lebih memilih menanggapi hal-hal yang relatif ringan dan tidak terlalu mengganggu struktur kekuasaan. Dengan demikian, memang ada ruang untuk reformasi nyata, tetapi ruang itu masih sangat terbatas. Selama DPR tidak serius menindaklanjuti tuntutan besar yang menyangkut keadilan sosial, demokrasi, dan perlindungan hak warga, hasil yang muncul lebih mirip janji politik untuk meredam gelombang protes dibanding komitmen perubahan mendalam.

Komparasi 1998, Hingga Saat ini

Pada tahun 1998 Di Indonesia sedang di landa dengan adanya krisis ekonomi yang sangat merosot tajam mulai dari nilai tukar rupiah yang sangat merosot adanya inflasi yang meningkat dan ada pula perusahaan yang bangkrut di kala itu di tahun 1998. Pada tahun tersebut terjadi aksi demokrasi besar besaran yang di lakukan oleh mahasiswa dan rakyat, yang Dimana mahasiswa dan rakyat menuntut agar masa jabatan soeharto di berhentikan pada kala itu juga. Karena mahasiswa menuntut adanya beberapa faktor yang membuat mahasiswa demonstrasi pada tahun tersebut



beberapa faktor nya yaitu: terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, adanya korupsi dan nepotisme, pembatasan kebebasan, adanya tuntutan reformasi dan ada pula pengaruh globalisasi (Basri et al., 2013).

Ada pula beberapa faktor terjadi kejadian di 1998 dari otoritarianisme, krisis ekonomi, dan jatuhnya rezim.

1. Otoritarianisme yang Dimana mahasiswa ber demonstrasi pada saat itu mengenai rezim orde baru yang di bawah pimpinan soeharto yang berkuasa selama 32 tahun pada masa soeharto memiliki otoritarianisme yaitu adanya kebebasan sipil politik di batasin dan ada pun oposisi politik yang di tekan.
2. Krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 mengalami penurunan yang sangat drastis mulai dari rendah nya nilai tukar rupiah ke dolar ada pun ketergantungan dan ada nya pinjaman luar negeri, banyak nya korupsi dan nepotisme dan adanya keterbatasan Cadangan devisa. Beberapa hal tersebut yang menyebabkan Indonesia pada saat itu terjadi krisis ekonomi yang sangat meningkat. Karena krisis ekonomi tersebut banyak yang terdampak mulai dari adanya pengangguran krisis perbankan adanya kemiskinan dan ketidakstabilan sosial dan politik.
3. jatuhnya rezim pada saat itu terjadilah krisis ekonomi yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat semakin luas yang Dimana terjadinya demontasi saat itu yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat mengenai protes dan adanya tuntutan reformasi menjadi sangat meningkat. Dengan ricuh nya Indonesia pada saat itu mahasiswa dan masyarakat meminta presiden pada saat itu untuk mengundurkan diri dari jabatan nya dan kala itu juga presiden soeharto yang menjabat selama 32 tahun mengundurkan diri sebagai presiden dan menandai jatuhnya rezim orde baru dan awal reformasi baru ada saat itu. (Riana, 2021)
4. Kejadian di Indonesia saat ini ialah salah satu nya yaitu adanya revisi undang undang yang di anggap buruk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat maka terjadilah demonstrasi pada tanggal 25 agustus 2025 yang adanya tuntutan 17+8 tersebut yang Dimana salah satu nya pengentian tunjangan dpr yang sangat naik drastic dan adanya kenaikan pajak yang sangat tinggi.

Jika di bandingkan dengan Indonesia pada saat demonstrasi 25 agustus 2025 indonesia sekarang sudah berada dalam kerangka demokrasi prosedural dengan adanya pemilu langsung, adanya partai politik dan kebebasan berpendapat semakin terbuka. namun dengan terjadinya demonstrasi pada tanggal 25 agustus 2025 kepercayaan masyarakat semakin turun kepada dpr dan lembaga Lembaga yang lain. Hal ini membuat masyarakat frustrasi terhadap elit politik yang gagal, mewakili aspirasi rakyat. (Syarief, 2025)

Adapula beberapa kemiripan yang terjadi apada Indonesia sekarang dan Indonesia dahulu pada tahun 1998 yang Dimana adanya kekecwaan rakyat kepada pemimpin politik, terdapat tuntutan perubahan yang besar, adanya solidaritas lintas kelompok yang muncul. Namun ada juga perbedaan yang mendasar yaitu konteks politik kini lebih terbuka, adanya diventaris Gerakan yang lebih kompleks, adanya peran elit politik lebih terfragmentasi dan alat komunikasi rakyat kini lebih kuat yaitu sekarang memakai media sosial dan adanya berita berita Dimana mana sedangkan pada tahun 1998 hanya adanya media cetak dan hanya mengandalkan mahasiswa dan organisasinya. (Syarief, 2025)



Dengan itu walaupun kejadian 1998 dan kejadian Indonesia pada saat ini dengan tuntutan 17+8 tidak sepenuhnya sama rakyat Kembali mempertanyakan bahwa menekankan agar dpr menjalankan fungsi nya dengan baik.

Komparasi antara Demonstrasi 1998 dan Demonstrasi 2025

Persamaan:

Persamaan	Tahun 1998	Tahun 2025
Krisis ekonomi	pada tahun 1998 ekonomi di Indonesia mengalami krisis yang sangat besar dan krisis ekonomi tersebut berdampak pada masyarakat	pada 25 Agustus 2025 adanya tekanan inflasi
korupsi	pada tahun 1998 terjadi demonstrasi yang sangat besar di sebabkan juga oleh korupsi yang di lakukan oleh beberapa oknum yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat.	pada demonstrasi 25 Agustus 2025 aksi juga melakukan salah satu tuntutan mengenai korupsi yang banyak terjadi pada saat itu.
Represi aparat	pada demonstrasi yang terjadi tahun 1998 aparat mengamankan para demonstrasi dengan adanya penangkapan dan penahanan	pada tahun 2025 tepatnya pada tanggal 25 Agustus sejumlah oknum juga mengamankan dengan adanya penangkapan dan penahanan
tuntutan reformasi	pada tahun 1998 para demonstrasi melakukan sejumlah tuntutan reformasi pada saat itu agar ada perubahan dalam sistem Politik dan ekonomi	pada tahun 2025 25 Agustus demonstrasi juga mempunyai tuntutan yaitu berupa 17+8 salah satu nya yaitu kenaikan gaji DPR

Perbedaan:

Perbedaan	Tahun 1998	Tahun 2025
konteks politik	pada tahun 1998 Indonesia saat itu berada dalam rezim otoritarian orde Baru yang di pimpin oleh soeharto	Indonesia sekarang berada dalam kerangka demonstrasi yang dimana adanya pemilu langsung, adanya partai politik dan adanya kebebasan berpendapat
Media	tahun 1998 hanya ada Media cetak dan ada mahasiswa/organisasi yang menjadi pegangan utama untuk penyebaran informasi	sekarang banyak Media sosial yang bisa menyebarkan informasi penting dan berita online
pola komunikasi	tahun 1998 komunikasi terbatas hanya berpusat kepada mahasiswa dan organisasi	Indonesia sekarang lebih bisa berkomunikasi dengan luas dan mempergunakan Media sosial secara luas
aktor gerakan	pada tahun 1998 aktor gerakan dari demonstrasi tersebut mahasiswa dan masyarakat yang menjadi aktor utama nya	pada sekarang banyak yang menjadi aktor utama seperti masyarakat, mahasiswa , masyarakat sipil, kelompok aktivis



Implikasi Reformasi

Aksi demonstrasi yang telah terjadi yang berasal dari ketimpangan sosial sehingga terjadi konflik sosial antara masyarakat dan juga pejabat pemerintahan, namun apakah kaitannya terhadap DPR?

Menanggapi kebijakan Presiden yang menaikkan gaji DPR yang memicu kontroversial terhadap situasi yang terjadi pada masyarakat, ternyata kebijakan tersebut dilakukan oleh Presiden. "Dasarnya ada pada UU No. 12 Tahun 1980 yang menyebutkan, bahwa pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara berhak mendapatkan gaji pokok setiap bulan." (Sulistianti, 2025).

Reformasi bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak menutup kemungkinan ada nya potensi-potensi yang akan terjadi kedepannya bahkan bisa lebih masif lagi terhadap gerakan sosial yang dikerahkan sehingga terjadi perubahan sosial yang lebih besar, bahkan "Jilid 3 Jilid 4" pun bisa terjadi tidak ada batasnya jika ketika ketidakadilan dianggap sebuah lelucon belaka bagi mereka yang tetap menginjak injak.

Semua hal demonstrasi terjadi tidak akan pernah mati, jikalau keadilan belum hidup di hati setiap manusia, ia akan tetap terus tumbuh dan berkembang menjelma kemarahan dan semakin besar.

Proses konsolidasi demokrasi di Indonesia masih terus berjalan dan menghadapi berbagai tantangan, meskipun telah berhasil membangun fondasi yang kuat sejak era Reformasi. Secara umum, demokrasi di Indonesia telah matang dalam hal prosedural, namun masih rapuh dalam hal substansi.

Transisi dari sistem otoriter Orde Baru ke sistem demokrasi multipartai telah melahirkan lembaga-lembaga negara yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemilihan umum (pemilu) yang rutin dan transparan menjadi mekanisme utama dalam transisi kekuasaan, menunjukkan komitmen negara terhadap kedaulatan rakyat. Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi juga menjadi pilar penting yang memungkinkan pengawasan publik terhadap pemerintah.

Namun, kemajuan ini diiringi dengan tantangan yang signifikan. Sistem hukum dan peradilan masih rentan terhadap intervensi politik dan korupsi, yang mengikis kepercayaan publik. Pengaruh oligarki, yaitu kelompok elit bisnis dan politik yang kuat, sering kali mendominasi proses pengambilan keputusan dan memengaruhi kebijakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, belakangan ini muncul kekhawatiran tentang kemunduran kebebasan sipil, di mana undang-undang seperti UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) digunakan untuk membatasi kritik dan kebebasan berpendapat. Polarisasi sosial dan politik yang semakin tajam, terutama selama masa pemilihan umum, juga menjadi ancaman terhadap kohesi masyarakat.

KESIMPULAN

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat mencerminkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPR yang dianggap gagal menjalankan fungsi representasi, transparansi, dan akuntabilitas. Aksi demonstrasi ini bukan sekadar luapan ketidakpuasan, melainkan simbol akumulasi kekecewaan publik atas praktik politik yang dinilai korup dan jauh dari aspirasi rakyat. Fenomena ini



menghadirkan kembali ingatan kolektif pada reformasi 1998, di mana suara rakyat menjadi motor perubahan besar.

Meninjau rangkaian peristiwa yang terjadi, rakyat menuntut keadilan dan kesejahteraan yang telah dicita citakan undang undang dasar 1945, semua bentuk eksploitasi yang terjadi atas masyarakat telah menjadi ujung tombak kemarahan yang memuncak akibat hasil dari kebijakan pemerintah yang kurang lihai dan pandai mengelola sumber daya, walaupun semua ini sudah terjadi semua siklus ini akan terus terulang ulang naik runtuh bagaikan paradoks, siklus sejarah lama yang berbunyi "generasi sulit akan menciptakan generasi kuat, generasi kuat akan menciptakan generasi nyaman, generasi nyaman akan menciptakan generasi lemah, generasi lemah akan menciptakan masa sulit", semua akan berputar dan pada akhirnya dipanggung dunia sandiwara suatu saat si miskin tak akan memiliki apapun untuk dimakan, kecuali si kaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, R. (2025). *17+8 Tuntutan Rakyat untuk Pemerintah yang Viral di Medsos, Ini Isinya*. <https://www.beautynesia.id/life/17-8-tuntutan-rakyat-untuk-pemerintah-yang-viral-di-medsos-ini-isinya/b-308870/amp>
- Basri, M. H., Mustamar, S., & Ningsih, S. (2013). DINAMIKA POLITIK REZIM ORDE BARU DI INDONESIA STUDI TENTANG KEGAGALAN KONSOLIDASI POLITIK REZIM ORDE BARU PADA TAHUN 1990-1996. *Publika Budaya*, 1(1), 1–15.
- Haris, A., AB Rahman, A. Bin, & Wan Ahmad, W. I. (2019). Mengenal Gerakan Sosial dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Hasanuddin Journal of Sociology*, 1(1), 15–24. <https://doi.org/10.31947/hjs.v1i1.6930>
- Hermanto, B. (2024). Dinamika Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Legislasi yang Partisipatoris PUBLIC PARTICIPATION DYNAMICS TOWARD An Analysis of Constitutional Court Decision. *Jurnal Yudisial, January*. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i2.668>
- Himawan, E. M., Pohlman, A., & Louis, W. (2022). Revisiting the May 1998 Riots in Indonesia: Civilians and Their Untold Memories. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41(2), 240–257. <https://doi.org/10.1177/18681034221084320>
- Mardianti, E. (2022). Gerakan Mahasiswa Dalam Pusaran Tiga Orde Kekuasaan: Antara Gerakan Moralitas Atau Gerakan Politis. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2(2), 82–103. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.82-103>
- Martitah, M., Hidayat, A., Anitasari, R. F., Rahman, M. A. M., & Aini, T. R. (2023). Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 545–594. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>
- Muhammad, L. M. (2016). Gerakan Sosial Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Di Jalur Pendakian Gunung Penanggungan Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. *Gerakan Sosial*, 38–39.
- Munsi, H. (2016). Dari Masa Lalu ke Masa Kini: Memori Kolektif, Konstruksi Negara dan Normalisasi Anti-Komunis. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(1), 30–43. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i1.998>
- Ranawati, N. K. (2025). *Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat yang Ramai di Medsos dan Maknanya*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8092490/apa-itu-17-8-tuntutan-rakyat-yang-ramai-di-medsos-dan-maknanya>



- Riana, D. R. (2021). Rekonstruksi Sejarah 1998 Dalam Perspektif New Historicism: Kajian Atas Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori. *Multilingual*, 20(2), 194–207. <https://doi.org/10.26499/multilingual.v20i2.224>
- Rizki, M. (2025). *Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik ke Parpol, DPR dan Polri Rendah*. <https://kumparan.com/kumparannews/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-ke-parpol-dpr-dan-polri-rendah-24NwZtPEjx9>
- Rohman, M. F. (2025). *Tagih Janji 17+8 Tuntutan Rakyat, Mahasiswa Lanjut Gelar Aksi di DPR*. 2–5. <https://www.nu.or.id/nasional/tagih-janji-17-8-tuntutan-rakyat-mahasiswa-lanjut-gelar-aksi-di-dpr-4KYYs>
- Sulistianti, R. (2025). *Gaji DPR Fantastis, tapi Siapa yang Berwenang Menentukan?* <https://www.inilah.com/siapa-yang-menentukan-gaji-dpr>
- Syarief, A. (2025). *Demo 1998 dan 2025: Dua Gelombang Kemarahan, Dua Zaman yang Berbeda*. <https://fusilatnews.com/demo-1998-dan-2025-dua-gelombang-kemarahan-dua-zaman-yang-berbeda/>
- Yonatan, A. Z. (2025). *Capai 360 Kasus, DPR & DPRD Jadi Profesi Ke-3 yang Paling Sering Korupsi*. <https://goodstats.id/article/capai-360-kasus-dpr-dan-dprd-jadi-profesi-ke-3-yang-paling-sering-korupsi-kb9kh>